

PELATIHAN MANAJEMEN RISIKO KREDIT PADA PT.BPR. WELERI JAYA PERSADA KABUPATEN KENDAL

Arief Himmawan Dwi Nugroho¹, Gregorius Anggana L², Maryono³

Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Stikubank
Jalan Kendeng V Bendan Ngisor, Semarang, Indonesia

ariefhimmawan@edu.unisbank.ac.id¹, anggana@edu.unisbank.ac.id², maryono@edu.unisbank.ac.id³

Abstrak

PT. BPR Weleri Jaya Persada merupakan salah satu Bank Perkreditan Rakyat yang berdiri di Kabupaten Kendal yang memberikan pelayanan menerima dana simpanan dan menyalurkan dalam bentuk kredit. Peserta dalam pengabdian adalah Dewan Komisaris, Direksi, Pejabat Eksekutif dan seluruh karyawan PT.BPR Weleri Jaya Persada. Permasalahan yang dialami mitra adalah kurangnya pemahaman terhadap manajemen risiko kredit serta peranan Komite Kredit. Pengelolaan manajemen risiko kredit yang tidak maksimal maka menyebabkan rasio kredit bermasalah (Non Performing Loan) diatas ketentuan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Akhir tahun 2022, PT.BPR Weleri Jaya Persada mengalami Rasio kredit bermasalah sebesar 8,35%. Solusi yang ditawarkan adalah memberikan pemahaman mengenai manajemen risiko kredit kepada Dewan Komisaris, Direksi, Kepala Bagian Kredit, Pejabat Eksekutif manajemen risiko dan Karyawan, terutama yang terlibat dalam bagian perkreditan. Tujuan dari kegiatan ini adalah memberikan pemahaman mengenai manajemen risiko kredit agar dapat menurunkan risiko kredit yang dapat diterima yang berdampak pada menurunnya rasio kredit bermasalah. Metode yang digunakan dalam pengabdian ini adalah metode kualitatif dengan cara wawancara, observasi dan ceramah penyampaian materi. Pemberian materi mengenai manajemen risiko kredit dan komite kredit disajikan dalam pengabdian ini. Dengan penyampaian materi tersebut diharapkan dapat menambah pengetahuan manajemen risiko dan komite kredit kepada Dewan Komisaris, Direksi, Kepala Bagian Kredit, Pejabat Eksekutif manajemen risiko dan Karyawan di PT BPR Weleri Jaya Persada.

Kata kunci: kredit bermasalah, manajemen risiko kredit, komite kredit,

Abstract

PT. BPR Weleri Jaya Persada is one of the Rural Banks established in Kendal Regency which provides services for receiving savings funds and distributing them in the form of credit. Participants in the service are the Board of Commissioners, Directors, Executive Officers and all employees of PT. BPR Weleri Jaya Persada. The problem experienced by partners is a lack of understanding of credit risk management and the role of the Credit Committee. Credit risk management that is not optimal causes the ratio of non-performing loans (Non Performing Loans) to be above the provisions of the Financial Services Authority (OJK). At the end of 2022, PT BPR Weleri Jaya Persada experienced a non-performing credit ratio of 8.35%. The solution offered is to provide an understanding of credit risk management to the Board of Commissioners, Directors, Head of Credit, Risk Management Executive Officers and Employees, especially those involved in the credit department. The aim of this activity is to provide an understanding of credit risk management in order to reduce acceptable credit risk which has an impact on reducing the ratio of non-performing loans. The method used in this service is a qualitative method by means of interviews, observations and lectures delivering material. Providing material regarding credit risk management and credit committees is presented in this service. By delivering this material, it is hoped that it will increase knowledge of risk management and credit committees to the Board of Commissioners, Directors, Head of Credit, Risk Management Executive Officers and Employees at PT BPR Weleri Jaya Persada.

Keywords: non-performing loans, credit risk management, credit committee,

PENDAHULUAN

Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-

bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak (UU Republik Indonesia No.10, 1998). Bank Perkreditan Rakyat (BPR) merupakan bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan Prinsip Syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. BPR hanya dapat menerima simpanan masyarakat dalam bentuk tabungan dan deposito serta menyalurkan kembali dalam bentuk kredit atau lainnya. BPR merupakan salah satu sumber pembiayaan bagi UMKM dalam pengembangan usahanya. Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara BPR dengan pihak peminjam yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. BPR diharapkan tumbuh setiap tahunnya dengan meningkatkan salah satunya pertumbuhan kredit yang diberikan. Pertumbuhan tersebut akan menyebabkan risiko kredit makin meningkat. Otoritas telah menerbitkan POJK No 13/POJK.03/2015 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi BPR. Namun masih diperlukan pemahaman yang sama Dewan Komisaris, Direksi dan seluruh karyawan terhadap pengelolaan manajemen risiko kredit. Sehingga dapat menurunkan rasio kredit bermasalah. Berdasarkan hasil survey awal yang dilakukan tim Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM), terdapat beberapa masalah yang menjadi kendala dalam pengelolaan manajemen risiko kredit. Manajemen Risiko adalah serangkaian metodologi dan prosedur yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan Risiko yang timbul dari seluruh kegiatan usaha BPR. Pengelolaan manajemen risiko kredit merupakan salah satu aspek kunci dalam menurunkan rasio kredit bermasalah. Ada beberapa prinsip dalam manajemen risiko, yaitu :

1. Pengawasan Direksi dan Dewan Komisaris

Diperlukan pembagian kewenangan dan tanggung jawab yang jelas Direksi dan Dewan Komisaris dalam penerapan manajemen risiko. Pemahaman terhadap penerapan manajemen risiko Direksi dan Dewan Komisaris telah memadai, namun belum jelas penerapan dalam pengawasan manajemen risiko.

2. Kecukupan kebijakan, prosedur dan limit

Kebijakan manajemen risiko meliputi penetapan besarnya risiko, sistem informasi, limit dan toleransi, penilaian peringkat, sistem pengendalian serta penyusunan rencana darurat.

3. Kecukupan proses dan sisti

Proses manajemen risiko kredit meliputi identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian Risiko yang didukung oleh sistem informasi manajemen yang memadai dan laporan yang akurat dan informatif mengenai kondisi keuangan BPR, kinerja aktivitas fungsional dan eksposur Risiko BPR.

4. Sistem pengendalian yang menyeluruh

BPR wajib melaksanakan sistem pengendalian intern yang menyeluruh secara efektif terhadap pelaksanaan kegiatan usaha dan operasional pada seluruh jenjang organisasi BPR. Pelaksanaan sistem pengendalian intern yang menyeluruh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 paling sedikit harus mampu mendeteksi kelemahan dan penyimpangan yang terjadi, secara tepat waktu.

Dari hasil pra survey di lapangan diperoleh informasi pemahaman terhadap pengelolaan manajemen risiko kredit belum memadai diseluruh jenjang organisasi PT. BPR Weleri Jaya Persada. Pemahaman yang masih berbeda-beda menjadi kendala dalam penerapan manajemen risiko kredit. Selain itu juga diperoleh informasi pemahaman terhadap peran komite kredit, yang merupakan bagian dari manajemen risiko kredit, belum efektif. Sehingga disimpulkan

jenjang organisasi BPR mulai dari Dewan Komisaris, Direksi dan karyawan layak mengikuti pelatihan ini.

Tabel 1
Analisa Situasi Mitra

No	Indikator	Pengelola	Ban
1.	Nama Mitra	PT. BPR Weleri Jaya Persada	PT. BPR Weleri Jaya Persada
2.	Status Mitra	Direktur Utama	Perseroan Terbatas
3.	Alamat	Tamtama 87 Weleri Kab Kendal	Tamtama 87 Weleri Kab Kendal
4.	SDM/Personil	Direksi, Kepala Bagian dan Pejabat Eksekutif dan karyawan	Pengawas : Dewan Komisaris Penanggung Jawab : Direksi Kepala Bagian dan Pejabat Eksekutif
5.	Jarak dari PT	+48 km	+48 km
6.	Potensi Mitra	1. Rata-rata pendidikan pelaksana D3 2. Bersedia mengikuti kegiatan yang akan dilaksanakan.	1. Beberapa pernah mengikuti sosialisasi manajemen risiko

METODE PELAKSANAAN

Pelaksanaan PKM ini dilakukan dengan metode kaji tindak partisipatif. Kaji tindak mencakup dihasilkannya pengetahuan dalam rangka pemecahan masalah atau perbaikan terhadap pemecahan masalah dalam kehidupan praktis (Elden & Chisholm, 1993). Kegiatan kaji tindak partisipatif merupakan sistem kerja yang teratur, paling tidak mengikuti tata urutan yang jelas. Kegiatannya melibatkan urutan kejadian dan kegiatan dalam setiap iterasi (*iteration*), seperti: identifikasi masalah, pengumpulan data, umpan balik dan data analisis, serta aksi (Selener, 1997).

Urutan kegiatan metode kaji tindak partisipatif selanjutnya dikolaborasikan dengan rencana kegiatan keseluruhan PKM untuk memberikan hasil yang optimal. Sehingga tahapan pelaksanaan kegiatan PKM secara keseluruhan dapat disusun sebagai berikut :

1. Persiapan Pelaksanaan PKM
2. Identifikasi dan Analisis Situasi Mitra pada PT. BPR Weleri Jaya Persada Kabupaten Kendal.
3. Dokumentasi hasil identifikasi permasalahan mitra
4. Menyusun rencana solusi permasalahan mitra
5. Diskusi dan persetujuan dengan mitra tentang rencana Solusi
6. Persiapan pemenuhan kebutuhan & pelaksanaan PKM
7. Pembuatan Modul Pelatihan
8. Pelaksanaan pelatihan
13. Pendampingan dan Monitoring dan Evaluasi Kegiatan PKM
14. Dokumentasi hasil dan Pelaporan
15. Selesai PKM

Alur Rencana kegiatan PKM tersebut dapat digambarkan sebagai berikut:

PEMBAHASAN Tahapan Kegiatan PKM

Kegiatan PKM ini dilakukan dengan menyewa ruang oleh PT. BPR Weleri Jaya Persada Kabupaten Kendal. Hal ini disebabkan diperlukan ruang yang lebih luas untuk dapat menampung seluruh peserta pelatihan. Dalam pelaksanaan para peserta mengikuti pelatihan dan ceramah

kegiatan yang dibagi dalam tiga sesi materi, dengan pembagian sesi sebagai berikut :

Tabel 2
Rencana Solusi Pengabdian kepada Mitra

No.	Rencana Solusi yang Ditawarkan dan Pelaksanaan Tim Pengabdian	Luaran Yang Ditawarkan	Keterangan
1.	Sosialisasi Manajemen Risiko dan Drs. Gregorius Anggana L., M.M.	1. Memahami dan mengerti pilar manajemen risiko	Diikuti Dewan Komisaris, Direksi, Kepala Bagian, Pejabat Eksekutif dan
2.	Pelatihan dan Pendampingan identifikasi dan Penilaian Risiko Kredit	Identifikasi risiko keuangan dan risiko non- keuangan serta penilaian risiko	Diikuti Dewan Komisaris, Direksi, Kepala Bagian, Pejabat Eksekutif dan
3.	Pelatihan dan pendampingan pembentukan dan efektivitas Komite Kredit	1. Peran Komite kredit 2. Faktor efektivitas Komite	Diikuti Dewan Komisaris, Direksi, Kepala Bagian, Pejabat Eksekutif dan

Berdasarkan tabel 2 di atas, materi pelatihan diberikan dalam tiga sesi. Setiap sesi diberikan oleh penceramah yang berbeda sesuai dengan keahlian dan kompetensinya. Peserta pelatihan adalah Dewan Komisaris, Direksi, Kepala Bagian, Pejabat Eksekutif dan karyawan di PT. BPR Weleri Jaya Persada Kabupaten Kendal.

Evaluasi Kegiatan

Dalam pelaksanaannya kegiatan pengabdian kepada masyarakat dapat berjalan dengan baik, dan lancar yang dilaksanakan tanggal 5 Agustus 2023 dengan waktu pelaksanaan jam 08.00–16.00. Pendampingan hasil pelatihan dilakukan sampai dengan akhir bulan Agustus 2023.

Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat dalam bentuk Pelatihan dan ceramah tentang Manajemen Risiko Kredit di PT. BPR Weleri Jaya Persada Kabupaten Kendal dievaluasi dengan kuesioner yang diberikan kepada peserta pelatihan 21 (duapuluhsatu) menyatakan +/- 90% dapat memahami materi pelatihan dan mampu mengerjakan latihan di lembar kerja pelatihan serta mempresentasikan hasilnya. Hal ini dibuktikan dengan peserta aktif bertanya kasus yang ada di lapangan dan memahami solusi masalahnya saat pelatihan.

PENUTUP

Simpulan

Dari hasil kegiatan PKM yang telah dilakukan di PT. BPR Weleri Jaya Persada Kabupaten Kendal dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Kegiatan dapat berjalan dengan lancar dan diikuti oleh Dewan Komisaris, Direksi, Kepala Bagian, Pejabat Eksekutif dan karyawan di PT. BPR Weleri Jaya Persada Kabupaten Kendal sebanyak 21 orang peserta.
2. Kegiatan tiap sesi bisa diterima oleh para pelaku dengan antusias dengan berbagai respon yang positif yang dilakukan oleh peserta pelatihan.

3. Dalam pelaksanaan kegiatan ini juga dilakukan pendampingan untuk memastikan hasil pelatihan dipahami dan diterapkan di setiap jenjang organisasi.

Saran

1. Waktu pelatihan yang diberikan kepada peserta sangat terbatas sehingga mereka masih menghendaki ada kegiatan lanjutan.
2. Diperlukan pelatihan berkelanjutan dengan materi lain, seperti Program Anti Pencucian dan Pencegahan Pendanaan Terorisme yang terbaru.

DAFTAR PUSTAKA

- Elden, M., & Chisholm, R. (1993). *Emerging Varieties of Action Research : Introduction to the Special Issue. Human Relation.*
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.62/POJK.03/2020 tentang Bank Perkreditan Rakyat
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.13/POJK.03/2015 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Perkreditan Rakyat.
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.33/POJK.03/2018 tentang Kualitas Aset Produktif dan Pembentukan Penyisihan Penghapusan Aset produktif Bank Perkreditan Rakyat.
- Selener, D. (1997). *Participatory Action Research and Social Change. , New York. New York, Ithaca: Cornell University.* Undang-Undang No.10 tahun 1998 tentang Perbankan
- .